ANALISIS YURIDIS MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU BERDASARKAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM

Xreste Debora Margareth Tambunan¹, Budiman N.P.D Sinaga²

xrestedeboramargareth.tambunan@student.uhn.ac.id¹, budiman.sinaga@uhn.ac.id²

Universitas HKBP Nomensan Medan

Abstrak: Penelitian ini menjelaskan mediasi penyelesaian sengketa proses pemilihan umum. Pemilihan umum harus menjadi pesta demokrasi yang diwarnai dengan kegembiraan, mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan dan hasil pemilihan umum melalui proses pemilihan yang berintegritas. Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sengketa proses pemilihan umum terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu sengketa yang terjadi antarpeserta pemilihan umum dan sengketa antara peserta pemilihan umum dengan penyelenggara pemilihan umum. Mediasi merupakan suatu prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai kendaraan untuk komunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa itu dapat dipahami dan mungkin didamaikan, namun tanggungjawab agar tercapai suatu perdamaian tetap berada ditangan para pihak itu sendiri. Mediasi penyelesaian sengketa proses pemilihan umum diharapkan ada kesepakatan diantara para pihak yang bersengketa sehingga dihasilkan penyelesaian sengketa secara win win solution. Sengketa hasil pemilihan umum hanya dilakukan melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Pengadilan Tata Usaha Negara, namun sengketa hasil pemilihan umum hanya diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi, dan harus ditempuh melalui prosedur mediasi dan adjudikasi.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Mediasi, Penyelesaian Sengketa.

Abstract: This research explains the mediation of dispute resolution in the general election process. General elections must be democratic celebration filled with joy, starting from the stages of preparation, implementation and results of the general election through an election process with integrity. Pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pemilihan umum, general election process disputes consist of 2 (two) types, namely disputes that occur between general election participants and disputes between general election participants and general election organizers. Mediation is a mediation procedure where someone acts as a vehicle for communication between the parties, so that their different views on the dispute can be understood and possibly reconciled, but the responsibility for achieving a peace remains in the hands of the parties themselves. Mediation for resolving disputes in the general election process is expected to result in an agreement between the disputing parties so that a win win solution can be obtained to resolve the dispute. Dispute over general election results are only resolved through the general election supervisory body (Bawaslu) and the state administrative court, but disputes over general election results are only resolved through the constitutional court, and must be resolved through mediation and adjudication procedures.

Keywords: General Election, Mediation, Dispute Resolution.

PENDAHULUAN

Konsep kedaulatan rakyat di Indonesia menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Sesuai dengan nilai Pancasila, tujuan Negara Republik Indonesia adalah membentuk masyarakat adil dan makmur. Negara Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan merupakan sumber hukum (sumber tertib hukum). Pemilihan umum merupakan wujud partisipasi politik masyarakat dalam negara demokrasi, oleh karena itu kejujuran dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilu akan mencerminkan kualitas demokrasi. Penyelenggaraan pemilu langsung untuk memilih wakil rakyat pada organisasi perwakilan baik pusat maupun daerah di Indonesia merupakan salah satu program utama reformasi dalam sektor politik dengan tujuan membangun membangun dan mewujudkan negara demokratis. (Zahara, 2023)

Indonesia adalah Negara yang menganut system demokrasi. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Artinya sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD NKRI bahwa sepenuhnya kedaulatan berada ditangan rakyat, yang mana dalam menentukan jalan dan sifat dari suatu pemerintahan sesungguhnya berada ditangan rakyat. Maka kedaulatan rakyat berada ditangan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat harus dijunjung tinggi oleh Negara untuk menjalankan pemilihan umum yang demokratis. Sebagaimana dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 22 E UUD 1945 yang berbunyi “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, setiap lima tahun sekali”.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang berbunyi “Pemilihan Umum yang disingkat dengan Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945”. Pemilihan Umum adalah proses dimana warga negara memilih pemimpin mereka secara demokratis melalui hak suara. Proses ini dilakukan untuk menentukan perwakilan yang akan duduk di posisi politik tertentu, seperti Presiden, anggota DPR dan pejabat pemerintah lainnya. Pemilihan umum memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah negara demokratis, karena memungkinkan warga negara untuk memilih pemimpin yang di anggap akan mewakili kepentingan dan aspirasi mereka. (Kirana, 2024)

Kekuatan penyelesaian sengketa Bawaslu didapatkan bedasarkan Pasal 466 Undang-Undang Pemilihan Umum dan untuk proses penanganan sengketa diatur dalam Pasal 467 sampai Pasal 469 dan juga diatur dalam Peraturan Bawaslu Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Penyelesaian sengketa proses pemilihan umum di Bawaslu yang menjadi bagian ranah hukum public yang tentu berbeda dengan sengketa keperdataan yang merupakan hukum privat. Dalam hukum privat syarat sahnya suatu kesepakatan kontrak suatu perjanjian harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara untuk melakukan perjanjian antara kedua belah pihak. Pada Pasal tersebut mengatur 4 syarat sebagai berikut:

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya
2. Adanya kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Mediasi di Bawaslu yang berada dalam ranah hukum publik yang menganut prinsip non caucus. Penyelesaian sengketa pemilihan umum yang dilakukan oleh Bawaslu dapat digolongkan sebagai penegakan hukum yang bersifat quasi judicial (Diki Zukriadi, 2023). Yang dimaksud dengan quasi judicial adalah suatu lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengadili seperti dipengadilan akan tetapi tidak bisa disebut sebagai pengadilan. Dalam proses penyelesaian sengketa pemilihan umum, bawaslu melaksanakan fungsi peradilan baik dalam fungsi perujukan ataupun mediasi dan fungsi peradilan melalui prosedur adjudikasi sekaligus dalam kedudukannya sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang menjalankan fungsi dan kewenangan sebagai

pengawas pemilihan umum.

Dalam hukum acara penyelesaian sengketa ada 2 metode penyelesaian sengketa pemilihan umum yang dilakukan oleh Bawaslu yakni mediasi dan adjudikasi. Mediasi dilakukan dengan cara mempertemukan para pihak dan dilaksanakan secara tertutup, tetapi jika sudah diupayakan mediasi namun tidak tercapai suatu kesepakatan, maka bawaslu akan melakukan siding Adjudikasi untuk memutuskan Permohonan atas penyelesaian sengketa proses pemilihan umum. Pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa pemilihan umum di bawaslu sebagaimana telah diatur dalam undang-undang yang bertindak sebagai mediator yaitu mediasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan umum (Ridho, 2018).

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 24 ayat (2) yaitu Bawaslu melakukan mediasi anatar pihak yang bersengketa, pasal 46 bahwa mediasi wajib dihadiri oleh pemohon dan termohon. Tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak penyelesaian sengketa proses pemilihan umum tidak dihadiri pemohon dan termohon sehingga mediasi dinyatakan gagal (Farha, H. 2023). Mediasi penyelesaian sengketa proses pemilihan umum dibatasi maksimal 2 hari secara berturut-turut, dalam waktu tersebut mediasi bisa dilakukan dalam beberapa kali dalam kurun waktu paling lama dua hari secara berturut-turut. dalam kurun waktu tersebut mediator mengupayakan penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mufakat untuk mencapai kesepakatan yang bisa mengakhiri sengketa yang terjadi antara para pihak yang bersengketa dan selanjutnya kesepakatan hasil mediasi dituliskan dalam formulir model PSPP 17 Berita Acara Mediasi dengan mengisi inti-inti hasil dari kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator.

Dalam pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa dapat memberikan kepastian hukum dan penegakan hukum dalam proses yang cepat, efisien dan ringan biaya sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum.

METODE PENELITIAN

Dalam ilmu hukum, dikenal 2 jenis penelitian yakni penelitian hukum normatif atau penelitian doctrinal. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum pada penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. (Mahendra, 2020)

Ini adalah studi hukum yang bertujuan untuk menjelaskan secara rinci dan sistematis terkait aturan-aturan hukum dalam bidang tertentu, menganalisis hubungan suatu standar hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian dari suatu aturan hukum atau bahkan berisi sebuah perkembangan di masa yang akan datang. Penelitian ini disebut penelitian yang berbasis kepustakaan. Sumber data sekunder ini berasal beberapa bahan hukum yang relevan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Data tersebut akan dianalisis dan kemudian disusun secara sistematis yang pada akhirnya digunakan sebagai bahan penarikan kesimpulan, sehingga dapat menjawab permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, sengketa pada pemilu terbagi menjadi dua yaitu sengketa antar peserta pemilihan umum serta sengketa antar peserta pemilihan umum dan penyelenggara. Sengketa antar peserta pemilihan umum terjadi karena ada hak yang dirugikan secara langsung oleh pihak peserta lainnya dalam salah satu tahap proses pemilihan umum.

Pelaksanaannya berasaskan Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Sengketa pemilihan umum ialah sengketa yang terjadi antara peserta pemilihan dan sengketa peserta pemilihan umum dengan penyelenggara pemilihan umum sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. Sengketa dalam proses pemilihan umum mempunyai dua tempat penyelesaian yakni sengketa proses pemilihan umum yang diselesaikan di Bawaslu dan sengketa proses pemilihan umum yang diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam melaksanakan penindakan terhadap sengketa proses pemilihan umum, Bawaslu sendiri bertugas menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum, memverifikasi, melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa untuk melakukan adjudikasi sengketa pemilihan umum dan memutuskan penyelesaian sengketa pemilihan umum (Erick dan Ikhwan, 2022).

Salah satu tahapan yang wajib dilakukan oleh Bawaslu dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan umum yaitu mediasi (Syahputra, 2023). Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 468 ayat (3) UU Pemilu tersebut, maka dalam Penyelesaian sengketa proses pemilihan umum yang harus dilakukan oleh Bawaslu setelah permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum dinyatakan dapat diregister adalah mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarahmufakat. Mediasi atau musyawarah hanya bisa tercapai jika kedua pihak yang bersengketa bersedia duduk bersama dan sepakat untuk berdamai dan mengakhiri sengketanya. Mediasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan umum diharapkan ada kesepakatan diantara para pihak yang bersengketa sehingga dihasilkan penyelesaian secara win win solution.

Mekanisme penyelesaian sengketa harus dilakukan sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Pemilihan Umum Jo Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan umum yang terjadi antara peserta pemilihan umum dengan Penyelenggara Pemilihan Umum, pengajuan permohonan dilakukan dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak waktu tanggal penetapan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (Polii, 2021).

Mediasi (musyawarah) yaitu proses musyawarah dalam penyelesaian sengketa secara sistematis yang melibatkan para pihak yang bersengketa bertemu dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan terkait dengan objek yang dipersengketakan (Anwar, 2020). Jika mediasi gagal, maka bawaslu dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui adjudikasi dengan proses persidangan. Bawaslu melakukan penyelesaian sengketa pemilihan umum melalui tahap menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa pemilihan umum dengan mempertemukan para pihak yang bersengketa agar tercapainya kesepakatan melalui mediasi musyawarah dan mufakat.

Menurut Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pasal 24 Ayat (2) bahwa Bawaslu melakukan mediasi antara pihak yang bersengketa. Cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum adalah mediasi dan adjudikasi. Mediasi adalah proses musyawarah secara sistematis yang melibatkan para pihak untuk memperoleh kesepakatan. Sedangkan Adjudikasi adalah proses persidangan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum.

a. Prosedur Mediasi

Mediasi adalah mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilihan umum dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan para pihak yang bersengketa. Menurut John W Head bahwa mediasi adalah suatu prosedur penengahan dimana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, namun tanggung jawab utama adalah tercapainya suatu perdamaian tetap berada ditangan para pihak itu sendiri (Ariati, 2022). Dengan demikian mediasi disebut sebagai negoisasi, mediasi terjadi karena para pihak yang tidak mampu menyelesaikan sengketa sehingga menggunakan pihak ketiga yang bersifat netral untuk membantu mereka mencapai kesepakatan dari objek yang dipersengketakan tersebut. Dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi, Bawaslu bertindak sebagai mediator dengan dibantu oleh tim mediasi yang terdiri dari dua orang pegawai sekretariat Bawaslu yang ditunjuk sebagai mediator.

Mediasi ialah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak berpihak serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketanya, namun tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Dalam hal mediasi penyelesaian sengketa pemilihan umum dapat dilihat dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022.

b. Prosedur Adjudikasi

Dalam proses penyelesaian sengketa pemilihan umum dikenal juga upaya penyelesaian sengketa adjudikasi. Adjudikasi dicapai jika tidak terjadi kesepakatan atau mufakat antara para pihak yang bersengketa, sehingga dilanjutkan dengan mekanisme adjudikasi. Dalam penyelesaian sengketa melalui adjudikasi, Bawaslu bertindak sebagai majelis sidang dengan dibantu oleh tim adjudikasi yaitu yang terdiri dari empat orang pegawai sekretariat Bawaslu. Tim adjudikasi memiliki tugas yang berbeda-beda, yakni sekretaris, asisten majelis sidang, notulen, dan perisalah.

Terkait dengan putusan adjudikasi yang diterbitkan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang tidak memuaskan pihak Pemohon, maka Pemohon dapat melakukan upaya administrasi melalui pengajuan permohonan koreksi Putusan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah putusan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dibacakan. Bawaslu mempunyai waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan koreksi deregister untuk menerbitkan hasil koreksi.

Penyelesaian sengketa melalui kedua prosedur ini memperkuat fungsi dan peran Bawaslu sebagai lembaga penyelesaian sengketa khususnya untuk sengketa proses pemilihan umum. Hal ini penting karena penegakan hukum Pemilihan umum atau disingkat dengan Pemilu merupakan indikator pemilihan umum yang demokratis.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum yakni : kurangnya pemahaman terhadap proses mediasi, ketidakpercayaan antara para pihak, serta kepentingan politik yang kuat di balik sengketa tersebut. Sehingga dibutuhkan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan proses mediasi sebagai opsi penyelesaian sengketa dalam pemilihan umum, baik dari segi sosialisasi dan edukasi, pengembangan kemampuan mediator, maupun peningkatan kesadaran dan partisipasi dari para pihak yang terlibat dalam sengketa.

B. Mekanisme Pelaksanaan Mediasi

Tata cara Mediasi dalam penyelesaian sengketa antara peserta pemilihan umum dengan penyelenggara pemilihan umum diatur di dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 51 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 9 Tahun 2022. Pasal 42 ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 menyatakan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan mediasi dengan mempertemukan pemohon dan termohon. Ayat (2) menyatakan bahwa Mediasi dilaksanakan paling lama 2 hari secara berturut-turut terhitung sejak permohonan diregister. Tahapan Mediasi diatur dalam Pasal 43, yakni:

(1) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaksanakan dengan tahapan :

- a. Pembacaan permohonan pemohon dan kronologis permasalahan yang menjadi sebab sengketa
- b. Perundingan kesepakatan
- c. Penyusunan kesepakatan antara pemohon dan termohon
- d. Penandatanganan berita acara mediasi
- e. Penuangan berita acara mediasi dalam putusan jika mediasi mencapai kesepakatan

(2) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara tertutup.

Mediasi dilaksanakan secara tertutup adalah sebagai pelaksanaan dari prinsip mediasi yaitu prinsip kerahasiaan, sehingga informasi dalam proses mediasi tidak diungkapkan pada pihak manapun. Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan umum ada 8 (delapan) prinsip sebagai berikut:

1. Tertutup. Artinya mediasi hanya dihadiri oleh pemohon, termohon, dan mediator yang sebagai pihak ketiga.
2. Rahasia. Artinya semua pernyataan dalam bentuk lisan maupun tulisan dalam proses mediasi tidak bisa dikatakan ke public serta menjadi alat bukti dalam proses pembuktian pada sidang adjudikasi.
3. Netral. Artinya mediator hanya memfasilitasi proses mediasi dan tidak bertindak layaknya seorang hakim ataupun juri yang dapat memutuskan salah atau benar dari pernyataan para pihak

ataupun mendukung pendapat dari salah satu pihak dan tidak memaksakan pendapat dan penyelesaian kepada para pihak. Disini mediator harus bersifat netral dan sebagai penengah antara para pihak yang bersengketa.

4. Tidak diwakilkan. Artinya mediasi wajib dihadiri oleh pemohon dan termohon dan tidak bisa diwakilkan kepada kuasa hukum, kuasa hukum hanya bisa mendampingi selama proses mediasi.
5. Kesepakatan berdasarkan Peraturan perundang-undangan. Artinya kesepakatan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kesepakatan harus mengikat para pihak.
6. Nonkukus. Artinya ketua dan anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dalam proses mediasi dilarang berkomunikasi, melakukan pertemuan ataupun membuat janji dengan salah satu pihak, baik diluar maupun di dalam ruangan mediasi.
7. Mediasi dilakukan berdasarkan prinsip cepat dan tanpa biaya. Artinya proses mediasi harus dilakukan dengan cepat dan tanpa pengeluaran.
8. Mediasi dilakukan mengacu pada asas pemilihan umum yakni asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa proses pemilihan umum.

Dalam pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa proses pemilihan umum diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatakan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menjadi mediator para pihak dalam menyelesaikan sengketa dengan cara yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Berikut ini tahapan pelaksanaan mediasi sebagai berikut:

- a. Pimpinan mediasi menyampaikan pernyataan pembuka, memperkenalkan diri sebagai mediator, menjelaskan tugas yang tidak berpihak, harus netral, dan menjelaskan ketentuan dalam mediasi.
- b. Penyampaian kronologi permasalahan dari para pihak. Dalam tahapan ini mediator mempersilahkan para pihak menyampaikan kedudukan hukum para pihak, kronologi masalah dari objek yang di persengketakan dan kerugian ataupun kepentingan langsung para pihak
- c. Perundingan kesepakatan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum. Dalam tahapan ini mediator memberikan waktu dan tempat kepada pemohon untuk menyampaikan bagian-bagian yang penting yang telah disepakati. Selanjutnya mempersilahkan termohon untuk menyampaikan bagian-bagian yang penting terkait kesepakatan dan kemudian pihak pemohon dan termohon menanggapi bagian-bagian dari kesepakatan tersebut.
- d. Penyusunan kesepakatan para pihak oleh mediator. Dalam tahapan ini mediator mempertemukan para pihak untuk menyelesaikan masalah dari objek yang dipersengketakan tersebut dengan cara mengetahui, menelaah posisi, kepentingan para pihak dan membangun kesepakatan, menyiapkan rancangan kesepakatan dengan merujuk ke kesepakatan awal dan membahas ulang rancangan kesepakatan dan melakukan perubahan jika dianggap perlu.
- e. Penandatanganan berita acara kesepakatan atau ketidak kesepakatan. Pada tahapan ini mediasi mencapai kesepakatan, maka Bawaslu menuliskan dalam berita acara mediasi telah tercapainya kesepakatan dan ditandatangani oleh para pihak dan pimpinan mediasi dan putusan dibacakan oleh pimpinan mediasi dalam ruang mediasi yang terbuka untuk umum.

Jika mediasi tidak tercapai kesepakatan, maka Bawaslu menuliskan dalam berita acara mediasi tidak tercapainya kesepakatan dan ditandatangani oleh para pihak dan pimpinan mediasi. Selanjutnya Bawaslu melanjutkan penyelesaian sengketa proses pemilihan umum melalui mekanisme adjudikasi dan pimpinan mediasi menyampaikan waktu dan tempat pelaksanaan adjudikasi secara lisan dalam ruangan mediasi sebagai panggilan resmi. Sedangkan jika mediasi telah mencapai kesepakatan, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menuangkan dalam bentuk berita acara mediasi tercapai kesepakatan. Dengan itu, putusan mediasi secara formal tindak lanjut dari kesepakatan yang telah tercapai dalam proses mediasi. Dan putusan mediasi dibuat dan dibacakan oleh pimpinan mediasi dalam ruang mediasi yang terbuka untuk umum.

KESIMPULAN

Pemilihan umum sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tata cara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum melalui mediasi menjadi sebuah keharusan bagi lembaga pengawas pemilihan umum seperti Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu). Oleh karena itu Perbawaslu telah mengatur secara jelas dan terperinci tentang tahapan mediasi yang harus dilakukan dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan umum melalui mediasi. Walaupun pengaturan terkait mediasi sudah dijelaskan secara terperinci, terutama mengenai jenis sengketa dan administrasi permohonan yang dapat diselesaikan melalui mediasi. Prosedur penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antar peserta pemilihan umum, antara peserta dengan penyelenggara pemilihan umum dengan prosedur mediasi dan adjudikasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwar, M. (2020). Perbandingan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia. *Akrab Juara: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*, 5(1), 18-34.
- Ariati, W. (2022). Pengaturan Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Berdasarkan Pengaturan Perundang-Undangan (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).
- Diki Zukriadi, S. H., & MH, M. K. (2023). Praktik Pemilu di Beberapa. *Penegakan Hukum Pemilu*, 27.
- Erick, B., & Ikhwan, M. (2022). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(2), 203-219.
- FARHA, H. (2023). Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Kirana, D. K., Setiawan, M. O. E., & Priza, S. (2024). Demokrasi Indonesia Dalam Kapasitas Pemilu Yang Luber Jurdil. *Journal Of Law And Social Society*, 1(1), 11-26.
- Mahendra, A. P. (2020). Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Polii, C. M. (2021). Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemilihan Umum. *Lex Administratum*, 9(6).
- Ridho, M. R. (2018). Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu Ri) Dalam Menyelesaikan Sengketa Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu)(Studi Kasus Sengketa Antara Partai Bulan Bintang Dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Pada Tahun 2018).
- Syahputra, A. (2023). Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Melalui Mediasi (Studi di Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nagan Raya). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 4(3), 120-128.
- Zahara, A., Signora, K. A., Siahaan, D. P., Fardani, S. N., Al Adawiyah, A., Tiara, S., ... & El Zuhra, F. (2023). Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. *Educandumedia: Jurnal Ilmu pendidikan dan kependidikan*, 2(1), 1-22.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum